

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup atau bekerja pada sektor pertanian, sehingga pembangunan pertanian memegang peran penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Pada hakekatnya tujuan akhir yang ingin dicapai pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani di sektor tersebut dalam konteks peningkatan kesejahteraan ekonomi regional dan nasional (Cahyono Wayan,2009:15).

Dari beberapa sub sektor yang ada, pertumbuhan sub sektor pertanian tanaman pangan paling kecil yaitu sekitar 2,10% per tahun. Selain karena faktor alam seperti iklim dan cuaca, kekeringan, serangan hama dan penyakit serius, dengan sistem manajemen seperti yang ada sekarang, sektor pertanian mengalami gejala kejenuhan. Artinya, sektor pertanian sedang mengalami gejala penerimaan output yang semakin berkurang (*diminishing returns*) karena produktifitas faktor produksi pertanian semakin menurun (Hutagalung H Rudi,2011:12).

Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakat yang ingin dicapai melalui pembangunan pertanian (Cahyono Wayan,2009:10).

Pentingnya penyuluhan pembangunan juga diawali oleh kesadaran akan adanya kebutuhan manusia untuk mengembangkan dirinya agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena itu, kegiatan penyuluhan pembangunan terus menerus dikembangkan dalam rangka menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agar mereka memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan yang dicita-citakan (Hutagalung H Rudi,2011:12).

Pengendalian Hama Terpadu merupakan suatu sistem pengelolaan populasi hama yang memanfaatkan semua teknik pengendalian yang sesuai dan seserasi mungkin untuk mengurangi populasi hama dan mempertahankannya pada suatu aras yang berada di bawah aras populasi hama yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi (Cahyono Wayan,2009:13).

Melalui kegiatan progam SLPHT diharapkan petani lebih berdaya dan mampu mengatasi permasalahannya sendiri, terutama pengendalian hama dan penyakit sejak dini apabila terjadi serangan hama dan penyakit di lahannya. Pelatihan SLPHT mampu mengubah petani dari berbudaya pasif tidak berdaya menjadi berdaya aktif, kreatif, inovatif, dan berwawasan ilmiah (hutagalung H. rudi 2006:14)

Berdasarkan posisi geografisnya kecamatan bulawa memiliki batas-batas: utara berbatasan dengan suwawa, selatan berbatasan dengan teluk tomini, barat berbatasan dengan bone pantai dan timur berbatasan dengan kecamatan bone raya. Kecamatan bulawa terdiri dari 9 desa dengan luas daerah menurut desa dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.Luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Kecamatan Menurut Desa Dikecamatan Bulawa,2017

No	Desa	Luas wilayah (km ²)	Persentase terhadap luas kecamatan (%)
1.	Kaidundu	22.39	20.17
2.	Mamungaa	6.52	5.88
3.	Kaidundu barat	17.07	15.38
4.	Mopuya	0.90	0.81
5.	Pinomontiga	13.50	12.16
6.	Dunggilata	7.71	6.95
7.	Mamungaa timur	8.44	7.60
8.	Bukit Hijau	26.33	23.71
9.	Patoa	8.15	7.34
Kecamatan Bulawa		111.01	100.00

Sumber : BPS Kecamatan bulawa

Luas wilayah bulawa secara keseluruhan adalah 111.01 km² jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten bone bolango, luas wilayah ini sebesar 17 persen. Sedangkan desa terluas dikecamatan bulawa adalah desa bukit hijau dan desa yang memiliki luas terkecil adalah desa mopuya. Masyarakat di kecamatan bulawa memiliki berbagai macam mata pencaharian baik sebagai petani, nelayan, penambang dll, namun karena daerah kecamatan bulawa berada dipesisir dan pegunungan masyarakat lebih dominan bekerja disektor pertanian, perkebunan dan nelayan. (Badan Pusat Statistik kecamatan bulawa, 2018)

Tanaman yang banyak dusahakan oleh petani dikecamatan Bulawa bervariasi diantaranya untuk tanaman hortikultura cabai, jagung dan tanaman tahunan berupa cengkeh dan kelapa.

Program sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di kecamatan bulawa dilaksanakan pada tahun 2015 yang dilaksanakan di dua desa yaitu desa mamungaa timur dan desa pinomontiga dimana yang menjadi peserta Program sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) secara keseluruhan berjumlah 30 orang.

Program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dikatakan berhasil apabila tujuan dari program SLPHT dapat tercapai. Untuk mengetahui keberhasilan program tersebut maka perlu dilakukan evaluasi, Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan program SLPHT telah dilaksanakan. Dalam penelitian kali ini akan mengevaluasi Program SLPHT di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone bolango.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang maka di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan petak perlakuan petani (PP) dan produksi tanaman pada petak perlakuan pht dalam pelaksanaan program peertanian SLPHT di Kecamatan Bulawa?
2. Apakah terdapat Pengaruh karakteristik sosial petani (umur, tingkat pendidikan, lama berusaha, jumlah tanggungan, luas lahan, Produksi)

terhadap keberhasilan program penyuluhan pertanian Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di Kecamatan Bulawa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui perbedaan produksi tanaman pada petak perlakuan pht dan petak perlakuan petani (PP) dalam pelaksanaan program peertanian SLPHT di kecamatan Bulawa.
2. Mengetahui hubungan karakteristik sosial ekonomi petani (umur, tingkat pendidikan, lama berusahatani, jumlah tanggungan, luas lahan) terhadap keberhasilan program penyuluhan pertanian Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di Kecamatan Bulawa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Informasi baru bagi peneliti mengenai evaluasi terhadap petani peserta penyuluhan pertanian lapangan SLPHT di Kecamatan Bulawa
2. Bagi Dinas Pertanian dan instansi terkait, sebagai bahan masukan untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja penyuluh di lapangan dalam rangka memberikan penyuluhan terutama terkait dengan SLPHT.
3. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan pembanding untuk melakukan penelitian sejenis.
4. Bagi petani, sebagai bahan koreksi akan keberhasilan dalam mengikuti kegiatan SLPHT.